

**DOMINASI WACANA ANTI-POLITIK BARAT
PADA MEDIA-MUSLIM REVIVALIS**
(Analisis Wacana Model Teun Van Dijk *Tabloid Media Umat* Edisi Pemilu 2014)

**DOMINATION OF ANTI-WESTERN POLITICAL THOUGHT DISCOURSE IN
REVIVALIST-MUSLIM MEDIA**
(*Discourse Analysis of Media Umat Tabloid in General Election Edition 2014*)

KARMAN

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI)-Balitbang SDM,
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Pegangsaan Timur 19 B, Menteng-Jakarta Pusat.

Telp/Faks : 021-31922337, e-mail : karman@kominfo.go.id

(Naskah diterima September 2014, Diperiksa Mitara Bestari Oktober 2014,
direvisi Oktober 2014, disetujui terbit November 2014)

ABSTRACT

Indonesia as a democratic country has conducted general elections since 1955. Democracy originating from Greece has globalized. In other word, it becomes grand narratives. In Indonesia, muslim media responds democracy differently. Some media denies it because of spirit to implement islam totally (revivalism). Media Umat tabloid is a media which voice discourse of ant-western politic (anti-democracy). This article deals with how media delegitimize democracy as product of the West, and what the reasons media delegitimize it. This discourse analysis harnesses analysis model introduced by Teun Van Dijk. This one focuses on textual structure. This research shows that Media Umat Tabloid focuses to delegitimize political parties because of their inability to make an improvement for Indonesia. According to Media Umat, The root cause is secularism & capitalism. The argumentation to delegitimize based on two different contexts. First, performance of political and legal institutions do not make an improvement and welfare. Oppositely, they do corruptive actions. Democracy tends to be on the side of capitalist and only and brings about demagogue. Second, delegitimization on the basis of theological argument that democracy is incompatible with Islamic canon (syari'ah).

Keywords : *Domination; Anti-Western Political Thought; Revivalist-Muslim Media.*

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara demokratis sudah menyelenggarakan proses pemilihan umum. Demokrasi yang berasal dari bangsa Yunani kini menjadi sistem yang mendunia, *grand narratives*. Di Indonesia, konsep ini mendapat penolakan dari umat islam. Penolakan ini dikaitkan dengan semangat untuk kembali ke sistem Islam secara total (revivalisme). Tabloid Media Umat adalah media yang menyuarakan wacana anti-demokrasi. Tulisan ini akan membahas bagaimana wacana delegitimasi sistem demokrasi sebagai produk Barat dilakukan oleh media tersebut, dan bagaimana media ini melakukan delegitimasi demokrasi. Penelitian menggunakan analisis wacana model Van Dijk yang fokus pada analisis struktur teks. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Tabloid MU mendelegitimasi Partai politik yang dinilai tidak akan menciptakan kemajuan dan menyelesaikan persoalan bangsa. Sebab, akarnya terletak pada sistem yang sekuler dan kapitalistik. Delegitimasi demokrasi didasarkan pada dua konteks yang berbeda. *Pertama*, kinerja lembaga politik dan hukum tidak mampu memberikan kemajuan dan kesejahteraan tapi malah berbuat korup. Demokrasi selalu berpihak kepada pemilik modal, dan melahirkan para demagogue. *Kedua*, delegitimasi atas dasar teologis. Demokrasi tidak sesuai dengan hukum Islam.

Kata-Kata Kunci : *Dominasi; Anti-Politik Barat; Media-Muslim Revivalis.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang & Fokus Penelitian

Barat dan Budayanya memegang peranan penting dalam kehidupan sosial-politik dan budaya kontemporer. Ini karena posisinya sebagai negara maju (*developed country*). Perkembangannya sering kali menjadi trendsetter bagi negara-negara berkembang (*developing country*) dan negara-negara terbelakang (*under-developed country*). Karena negara Barat umumnya adalah negara-negara

maju sedangkan negara-negara dunia ketiga sebagian besar adalah negara-negara sedang dan tumbuh dan berkembang, dan sebagian adalah negara muslim atau negara-negara yang mayoritas muslim. Dalam proses pembangunan, negara yang berkembang cenderung mengikuti atau mengadopsi negara-negara maju dalam hal sistem politik, ekonomi, dan budaya.

Dalam politik, negara-negara Barat mempunyai sistem yang sudah lama membudaya, yaitu sistem politik demokrasi. Demokrasi itu awalnya dari Yunani yang acapkali dianggap *cradle of civilization* dari negara Barat. dominanya posisi Barat dalam kancah pergaulan global menempatkan negara tersebut dalam posisi yang dominan dan dapat mengontrol bahkan memaksa negara lain untuk mengikuti sistem politik Barat, yaitu demokrasi. Oleh karena itu, Barat selalu mengkampanyekan demokratisasi ke negara-negara berkembang, seperti di kawasan Timur Tengah yang dikenal dengan istilah *Arabic Spring*, dan negara-negara Asia. Jadi, demokrasi adalah bagian dari politik anti Barat.

Indonesia adalah salah satu negara demokratis, bahkan negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika. Parameter negara demokratis menurut Robert Alan Dahl (1915 – 2014) adalah : (1) kontrol atas keputusan-keputusan pemerintah tentang kebijakan secara konstitusional terletak pada para wakil rakyat; (2) wakil rakyat yang terpilih, dipilih dan digantikan secara teratur, damai, adil dan melalui pemilihan bebas, tanpa pemaksaan dan pembatasan; (3) semua orang dewasa memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan; (4) kebanyakan orang dewasa memiliki hak untuk mengejar jabatan publik, yaitu sesuatu yang dikejar oleh para kandidat dalam proses pemilu; (5) warganegara mendapatkan hak untuk berekspresi secara efektif, khususnya ekspresi politik termasuk mengkritik para pejabat, mengkritik tingkah laku pemerintah, politik yang berlaku, ekonomi, sistem sosial dan ideologi dominan; (6) warga negara memiliki akses menuju sumber informasi alternatif yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau oleh suatu kelompok tertentu; (7) warga negara memiliki dan secara efektif menegakkan hak untuk membentuk dan mengikuti organisasi-organisasi otonom, termasuk organisasi politik, seperti kelompok politik dan kelompok kepentingan, yang berusaha untuk memengaruhi pemerintah dengan berkompetisi dalam pemilu dan dengan tujuan-tujuan lain yang memiliki maksud damai (Gaffar 1996, 6-7).

Indikator atau syarat demokrasi menurut Diamond dkk adalah (*pertama*) adanya kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu dan kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan dalam pemerintahan yang mempunyai kekuasaan efektif, pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa. *Kedua*, adanya partisipasi politik yang melibatkan warga dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil, sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok yang dikecualikan. *Ketiga*, adanya kebebasan sipil dan politik; kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan membentuk dan bergabung ke dalam organisasi. Diamond menyebutkan sepuluh komponen khusus demokrasi, yaitu (1) kontrol terhadap negara, keputusan dan alokasi sumberdaya dilakukan oleh pejabat publik yang terpilih; (2) Kekuasaan eksekutif dibatasi, secara konstitusional dan faktual oleh kekuasaan otonom institusi pemerintahan yang lain; (3) kebebasan membentuk partai politik dan mengikuti pemilihan umum; (4) adanya kesempatan pada kelompok-kelompok minoritas untuk mengungkapkan kepentingannya; (5) kebebasan bagi warga negara untuk membentuk dan bergabung dengan berbagai perkumpulan dan gerakan independen; (6) tersedianya sumber informasi alternatif; (7) setiap individu memiliki kebebasan beragama, berpendapat, berdiskusi, berbicara, publikasi, berserikat, berdemonstrasi dan menyampaikan pendapat; (8) setiap warga negara mempunyai kedaulatan yang setara di hadapan hukum; (9) kebebasan individu dan kelompok dilindungi secara efektif oleh sebuah peradilan yang independen dan tidak diskriminatif; (10) aturan hukum (*rule of law*) melindungi warga negara dari penahanan yang tidak sah, pengucilan, teror, penyiksaan dan campur tangan yang tidak sepatutnya dalam kehidupan pribadi baik oleh warga negara maupun kekuatan -non-organisasi non-negara dan anti-negara (lihat, Indikator demokrasi Indonesia (IDI), 2009)

Terkait dengan proses demokratisasi di Indonesia, Indonesia sudah menyelenggarakan proses pemilihan umum. Pemilu di Indonesia itu sendiri dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan pemilu 2014. Di negara manapun, Jika ia mau dikatakan sebagai negara demokrasi harus melakukan pemilihan umum. Bukan hanya itu, demokrasi menuntut proses pemilihan pemimpin melalui prosedur pemilihan, misalnya untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota, pemilihan kepala desa, termasuk juga organisasi-organisasi

kemasyarakatan dan keagamaan. Ini merupakan wujud konkrit prinsip demokrasi “*dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat*”, suara rakyat suara Tuhan (Bahasa Latin : *Vox Populi Vox Dei*).

Demokrasi yang berasal dari bangsa Yunani kini menjadi sistem yang mendunia. Kebenaran sistem demokrasi yang awalnya parikular dan parsial suatu kelompok tertentu kini dijadikan, dioaksakan kepada bahkan menjadi tolak ukur kebenaran. Hal ini bila menunjukkan bahwa demokrasi sudah menjadi sebuah *doxa* (meminjam istilah kata Bourdieu), atau *grand narasi/grand narratives* (kata Francois Lyotard) atau episteme (kata Foucault). Bangsa di dunia ini diwajibkan menganut demokrasi dan menerimanya secara *taken for granted*. Padahal, sebagai sebuah produk dari budaya, *millieu* tertentu, ia tidak bebas nilai. Ada budaya yang melingkupinya mengikatnya. Oleh karena itu, konsep tersebut harus disesuaikan dengan kultur, *logos*, budaya tiap bangsa melalui proses adaptasi dan adopsi sistem kebudayaan. Kondisi Indonesia yang penuh dengan keragaman kultur dan agama melahirkan sikap yang beragam pula terhadap demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi sebagai sebuah falsafat dan prosedur pemilihan pemimpin mendapat penolakan.

Wacana Anti-Demokrasi oleh Media Muslim

Penolakan terhadap sistem demokrasi di Indonesia selain karena pertimbangan budaya seperti yang terjadi di suku Baduy Banten, juga karena nilai-nilai agama. Sistem demokrasi mendapat penolakan dari sebagian dari sebagian umat Islam. Komunitas atau jamaah dari umat Islam menolak demokrasi karena sistem ini tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Fenomena penolakan demokrasi oleh komunitas Islam dikaitkan dengan semangat untuk kembali ke sistem Islam. Para pakar menyebutnya dengan istilah revivalisme, fundamentalisme, literalisme, skripturalisme. Berbedanya istilah tersebut namun, esensinya sama, yaitu meningkatnya gairah atau semangat untuk kembali ke Islam dan penyesuaian identitas kepada nilai-nilai yang diderivasi dari Tuhan. Kerangka ideologis umum revivalisme dalam agama Islam -menurut John L. Esposito- mencakup keyakinan bahwa Islam adalah pandangan hidup yang total dan lengkap mencakup aspek agama integral dengan politik, hukum, dan masyarakat. Kaum *revivalist* memandang bahwa kegagalan masyarakat muslim disebabkan oleh penyimpangan mereka dari Islam dan mengikuti jalan sekuler Barat, dan nilai-nilai sekuler-materialistis. Pembaruan masyarakat mensyaratkan kembali kepada islam berupa reformasi atau revolusi religio-politik merujuk pada Al Quran dan gerakan besar pertama yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Ilmu pengetahuan dan teknologi boleh diterima dengan syarat harus tunduk pada akidah dan nilai-nilai Islam. Proses Islamisasi memerlukan organisasi-organisasi atau serikat-serikat Muslim yang berdedikasi dan terlatih untuk mengajak orang lain yang untuk lebih taat dan mau berjihad melawan korupsi dan ketidakadilan sosial (lihat Esposito 2004, 205).

Manual Castell menyebut gejala di atas dengan istilah fundamentalisme. Menurutnya, fundamentalisme adalah konstruksi identitas kolektif (*collective identity*) melalui pengidentifikasi perilaku diri individu dan institusi kemasyarakatan dengan norma-norma yang berasal dari hukum Tuhan, diinterpretasikan oleh mereka yang memiliki otoritas yang bertindak sebagai perantara (*intermediator*) antara Tuhan dan manusia (Castell 1997, 13). Pengidentifikasi diri individu dan masyarakat ini dilakukan dengan merujuk pada nilai-nilai Islam. Samuel Huntington menggambarkan kalangan fundamentalis itu dengan sikap menerima modernitas, menolak budaya Barat, senantiasa mencari solusi dari sudut pandang Islam karena Islam dijadikan sebagai panduan dan pandangan hidup (lihat Huntington 1996, 110). Ciri lain fundamentalisme adalah ditandai dengan sikap yang melawan (*fight*), diantaranya adalah melawan kelompok-kelompok yang dianggap mengancam keberadaan mereka, berjuang untuk (*fight for*) menegakkan cita-cita yang mencakup persoalan hidup secara umum, berjuang dengan (*fight with*) nilai-nilai identitas tertentu, melawan (*fight against*) musuh-musuh dalam bentuk komunitas atau tata sosial keagamaan yang dipandang menyimpang, serta berjuang atas nama (*fight under*) Tuhan (lihat Taher 1998, xix).

Wacana penolakan sistem demokrasi dengan semangat revivalisme islam muncul di berbagai media partisan, yaitu : 1) buletin *Al Islam*, yang disebar di sebagian masjid setiap hari Jumat; 2) tabloid dua mingguan *Tabloid Media Umat*, (untuk selanjutnya disebut *Tabloid MU*); 3) Majalah bulanan *Al-Wa'ie*, 4) melalui situs resmi organisasi tersebut (hti.or.id). Selain menolak melalui wacana media, organisasi ini juga sering menyikapi kebijakan pemerintah melalui aksi demonstrasi yang mereka sebut dengan istilah *munashoroh*. Terkait dengan pemilu 2014, *Tabloid MU* membahasnya pada edisi 125, 4-17 April 2014 M atau 4-17 Jumadil Akhir 1435 H.

Negara Indonesia –seperti diulas di muka- merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi serta menjunjung tinggi nasionalisme sebagai negara bangsa (*nation state*). Sebaliknya, media *Tabloid MU* menolak itu kedua hal tersebut. Pertanyaan yang muncul adalah : “*bagaimana wacana anti-Politik Barat dilakukan oleh media muslim revivalis*”. Tujuan melakukan kajian ini adalah ingin mengetahui (*pertama*) wacana anti politik Barat berupa demokrasi yang didelegitimasi oleh media muslim revivalis dan (*kedua*) apa yang menjadi alasan media muslim revivalis melakukan wacana anti-politik Barat.

Kerangka Konsep

Bagian ini akan menjelaskan konsep-konsep yang dianggap relevan terhadap kajian ini. Konsep yang akan diulas menyangkut wacana sebagai sebuah konstruksi. Di sini penulis akan memaparkan (*pertama*) Konsep Konstruksi Realitas Sosial. Teori ini diperkenalkan oleh Peter Ludwig Berger. Menurut Penulis, wacana di media adalah produk atau hasil dari konstruksi. Penulis juga akan menjelaskan (*kedua*) konsep Delegitimasi yang ditulis oleh Francois Lyotard, penulis buku “*The Postmodern Condition*”. Alasannya adalah karena wacana yang digulirkan oleh *Tabloid MU* merupakan bentuk wacana delegitimasi terhadap sistem demokrasi.

1. Wacana Sebagai Produk Kontruksi

Setiap tindakan komunikasi senantiasa mengandung kepentingan. Apalagi komunikasi melalui media, maka layaklah jika dikatakan bahwa setiap tindakan komunikasi adalah suatu Discourse (dengan D besar). Dalam pandangan *communication as Discourse* ini, komunikasi dilakukan dalam rangka menciptakan “*kenyataan lain*” atau “*kenyataan kedua*” dalam bentuk wacana (*discourse*) dari “*kenyataan yang pertama*”. Cara yang ditempuh dalam pembentukan wacana (*realitas kedua*) itu adalah proses konstruksi realitas (*construction of reality*). Proses konstruksi realitas dimulai dengan adanya realitas pertama berupa keadaan, dalam konteks kajian ini adalah aktivitas demokrasi yang ada di Indonesia berupa pemilihan umum 2014. Dalam memberitakan masalah ini, terjadi dinamika internal pada awak atau penulis *Tabloid MU*. Pendirian penulis atau wartawan, penulis, dan awak *Tabloid MU* menentukan konstruksi apa yang akan dibentuk. Jadi, realitas yang ada di media adalah realitas yang kedua, realitas yang sudah terkonstruksi. Untuk melakukan konstruksi realitas, pelaku konstruksi memakai suatu strategi tertentu. Tidak terlepas dari pengaruh eksternal dan internal, strategi konstruksi ini mencakup pilihan bahasa mulai dari kata hingga paragraf, pilihan fakta yang akan dimasukkan, atau fakta yang akan dikeluarkan. Selanjutnya, hasil dari proses konstruksi ini adalah wacana (*discourse*) berupa teks di *Tabloid MU* (lihat Hamad 2006). Gagasan bahwa teks yang ada di media sebagai konstruksi juga dapat dijelaskan dengan teori dialektika yang diperkenalkan oleh Peter L. Berger. Teori yang ia perkenalkan dikenal dengan Teori Konstruksi Realitas Sosial atau Teori Dialektika.

Isilah konstruktivisme dipakai untuk menjelaskan bahwa setiap individu menafsirkan sesuatu dan berperilaku menurut katagori-katagori konseptual dari pikirannya. Realitas tidaklah muncul begitu saja dalam bentuk mentah melainkan harus disaring sesuai cara pandang seseorang mengenai setiap hal yang ada (Littlejohn 2009, 112-113). Teori Konstruksi Realitas Sosial termasuk tradisi atau metateori Sosio-Kultural (*socioculture*) yang fokus terhadap makna dan penafsiran bersama yang dikonstruksi dalam jaringan masyarakat dan implikasinya pada konstruksi kehidupan organisasi (aturan, norma, nilai, perbuatan yang diterima dalam organisasi (lihat, Littlejohn 2011, 56).

Para konstruktivis percaya bahwa untuk mengetahui “Dunia Arti” atau *World of Meaning*, mereka harus menginterpretasikannya. Mereka juga harus menyelidiki proses pembentukan arti yang muncul dalam bahasa atau aksi-aksi sosial para aktor (Schwandt 1994, 118). Jadi, dengan menggunakan alur berfikir ini, media bukan entitas yang mencerminkan realitas atau fenomena sosial tapi media adalah agen yang melakukan konstruksi realitas. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menulis risalah teoritisnya tentang konstruktivisme dalam buku berjudul “*The Social Contruction of Reality*”. Pokok-pokok pemikiran Peter Berger dan Thomas Lucman tentang “Konstruksi Realitas Sosial” mencakup (*pertama*) Sosiologi Pengetahuan, (*kedua*) masyarakat sebagai kenyataan objektif, dan (*ketiga*) masyarakat sebagai kenyataan subjektif.

2. Konsep Delegitimasi

Delegitimasi lazim dikenal dalam teori-teori postmodernisme. Konsep ini ditandai dengan jatuhnya pamor metanaratif, atau teks-teks besar yang dulu diagungkan. Di sisi lain, teks-teks kecil yang dulu dipinggirkan atau dianggap tidak penting mulai bangkit dan merebut posisi yang baik.

Seperti kata Angela McRobbie (dalam Storey 2001, 151): “*It is the coming into being of those whose voices were historically drowned out by the modernist metanarratives of mastery, which were in turn both patriarchal and imperialist*”, suara yang secara historis terpendam oleh kebesaran teks-teks agung, bangkit dan menemukan dirinya kembali. Atau seperti yang dikatakan Francois Lyotard, postmodernisme ditandai dengan runtuhnya narasi-narasi besar yang bersifat universal dengan segenap hak-hak istimewanya untuk mengatakan kebenaran. Sebagai gantinya kita akan menyaksikan semakin nyaringnya berbagai ragam suara-suara dari pinggiran, dengan segenap perbedaan dan keanekaragaman budaya (dalam Storey 2001, 150).

Kritik terhadap grand narasi atau metarasi (*grand narratives*) berasal dari Jean-François Lyotard. Pemikiran Lyotard umumnya berkisar tentang posisi pengetahuan di abad ini, khususnya tentang cara ilmu dilegitimasi melalui, yang disebutnya sebagai “narasi besar” (*grand narrative*), seperti kebebasan, kemajuan, emansipasi kaum proletar dan sebagainya. Menurut Lyotard, narasi-narasi besar ini telah mengalami nasib yang sama dengan narasi-narasi besar sebelumnya seperti religi, negara-kebangsaan, kepercayaan tentang keunggulan Barat dan sebagainya, yaitu mereka pun kini menjadi sulit untuk dipercaya. Dengan kata lain, dalam abad ilmiah ini narasi-narasi besar menjadi tidak mungkin, khususnya narasi tentang peranan dan kesahihan ilmu itu sendiri. Dalam kerangka ini pula, aspek mendasar yang dikemukakan oleh Lyotard pada dasarnya merupakan upaya tentang kemustahilannya membangun sebuah wacana universal nalar sebagaimana diyakini oleh kaum modernis (Sindhunata 1993, 56).

Dari perspektif Lyotard ini, dapat dipahami bahwa postmodernisme adalah usaha penolakan dan bentuk ketidakpercayaan terhadap segala “Narasi Besar” filsafat modern; penolakan filsafat metafisis, filsafat sejarah dan segala bentuk pemikiran yang mentotalisasi—seperti Hegelianisme, Liberalisme, Marxisme, atau apapun. Dengan demikian, postmodernisme menolak pemikiran yang totaliter, juga mengimplikasikan dan menganjurkan kepekaan kita terhadap perbedaan dan memperkuat toleransi terhadap kenyataan yang tak terukur (Suseno 1999, 60).

Lyotard merujuk ‘*delegitimation*’ sebagai perlawanan dari apa yang disebut olehnya dengan istilah ‘*grand narrative*’, yang muncul ketika pertanyaan diajukan berkaitan dengan legitimasi pengetahuan ‘*legitimation of knowledge*’, yaitu dengan mencari penyebab atau akar dari ‘*grand narrative*’ itu sendiri. Lyotard memahami bahwa pengetahuan diapresiasi manakala ia mengalami duplikasi diri melalui produksi diskursus (Lyotard 1986, 38). Demokrasi dalam konteks kajian ini adalah sebagai bentuk grand narasi yang dilegitimasi oleh masyarakat modern. Lyotard mengatakan bahwa dalam abad modern ilmu pengetahuan atau sains yang mengklaim dirinya sebagai satu-satunya jenis pengetahuan yang valid, tidak dapat melegitimasi klaimnya itu, karena aturan main sains bersifat inheren dan ditentukan oleh konsensus diantara para ilmuwan itu sendiri. Sains melegitimasi dirinya secara kongkrit dengan bantuan beberapa narasi besar (*grand narratives*). Ilmu pengetahuan (*science*) jika tidak memperoleh legitimasi maka ia bukanlah ilmu pengetahuan (*science*).

Metode Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai paradigma penelitian, jenis dan tipe penelitian, objek penelitian, teknik penelitian dan kerangka analisis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengacu pada paradigma konstruktivisme. Penjelasan mengenai suatu gejala diperoleh pelaku (peneliti) sendiri yang menafsirkan mengenai wacana di media massa (*Tabloid MU*). Dalam hal ini, peneliti memahami realitas di *Tabloid MU* dengan Teori Posmodernisme.

Lokus penelitian ini adalah *Tabloid MU*. Edisi yang dijadikan objek penelitian adalah edisi pemilihan umum, yaitu edisi 125, 4-17 Jumadil Akhir 1435 H/4-17 April 2014 M pada rubrik editorial. Pada edisi ini fokus media ini adalah tentang *Khilafah Islamiyah*, menentang demokrasi dan sistem pemilihan umum di Indonesia. Peneliti memilih artikel-artikel yang sesuai dengan tema penelitian, yaitu wacana delegitimasi di *Tabloid MU*. Analisis data untuk kepentingan penelitian ini menggunakan model kerangka analisis Teun A. Van Dijk. Ia mengelaborasi elemen-elemen analisis wacana sehingga bisa digunakan dan dipakai secara praktis. Van Dijk menghubungkan analisis tekstual baik dalam hubungannya dengan individu wartawan maupun dengan masyarakat (Eriyanto 2009, 225). Analisis Wacana oleh Van Dijk dibagi 3 (tiga) Struktur, yaitu : 1) Analisis Teks; 2) Analisis Kognisi; 3) Analisis Sosial (*Societal Analysis*).

Berikut akan dijelaskan ketiga struktur analisis tersebut (analisis teks, analisis kognisi sosial, dan analisis sosial. Dalam melakukan analisis teks, Teun Van Dijk memperkenalkan perangkat

analisis teks. Secara garis besar perangkat analisis teks tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan struktur, yaitu : 1). *Struktur Makro*. Ini merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang dapat dipahami dengan melihat topik dari suatu teks. Tema wacana ini bukan hanya isi, tetapi juga sisi tertentu dari suatu peristiwa; 2). *Suprastuktur*. Ini berkaitan dengan bagaimana struktur dan elemen-wacana disusun dalam teks secara utuh; 3). *Struktur Mikro*. Ini berkaitan dengan makna wacana yang dapat diamati dengan menganalisis kata, proposisi, anak kalimat, parafrase yang dipakai. Berikut skema struktur analisis teks menurut Teun Van Dijk. Penelitian ini lebih akan difokuskan kepada analisis teks saja. Berikut ini (tabel 1) tentang sruktur analisis Teks menurut Teun Van Dijk.

Tabel 1
Struktur Analisis Teks Menurut Teun Van Dijk

STRUKTUR WACANA	HAL YANG DIAMATI	ELEMEN
Struktur Makro	Tematik Tema/topik yang dikedepankan dalam suatu berita	Topik
Suprastruktur	Skematik Bagaimana bagian dan urutan berita diskemakan dalam teks berita utuh	Skema
Struktur Mikro	Semantik Makna yang ingin ditekankan dalam teks berita. Misalnya dengan memberi detil pada satu sisi atau membuat eksplisit satu sisi dan mengurangi detil sisi yang lain.	Latar, detil, maksud, praanggapan, nominalisasi
Struktur Mikro	Sintaksis Bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks berita.	Bentuk kalimat, koherensi, kata ganti
	Stilistik Bagaimana pilihan kata dalam teks berita.	Leksikon
Struktur Mikro	Retoris Bagaimana dan dengan cara penekanan dilakukan	Grafis, metafora, ekspresi

Sumber : Eriyanto (2009).

Jadi, elemen yang menjadi perhatian peneliti dalam masalah ini adalah pada aspek tematik, skematik, latar, detil, maksud, koherensi, koherensi kondisional, koherensi pembeda, pengingkaran, bentuk kalimat, kata ganti, leksikon, praanggapan, grafis, metafora.

PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan mengungkapkan hasil penelitian yang mencakup : *Pertama*. temuan umum dari hasil penelitian yang mencakup rubrikasi dalam *Tabloid MU* dan bagaimana deskripsi pemberitaan *Tabloid MU* dalam kaitannya dengan realitas demokrasi dikonstruksi dan didelegitimasi. *Kedua*, temuan hasil penelitian menurut kerangka analisis Teun Van Dijk.

1. Hasil Penelitian

Rubrikasi Tabloid MU. *Tabloid MU* dapat dikatakan tabloid yang berbeda dari tabloid lainnya. Kalau tabloid lain berisi berita dari berbagai peristiwa, dan yang menulis artikel dari kelompok yang berbeda. *Tabloid MU* kebanyakan berisi artikel opini. Dan berita yang ada di dalamnya adalah berita yang menyorot kegiatan HTI gejala ini juga terlihat pada edisi yang diteliti oleh peneliti yaitu edisi 125, 4-17 Jumadil Akhir 1435H atau 4-17 April 2014. *Tag line* berita ini adalah “*Memperjuangkan Umat Islam*”. Jadi, tabloid ini adalah media umat islam (HTI) yang berusaha menghadirkan wacana sesuai dengan pemahaman yang dipegang oleh pendiri dan organisasi *Tabloid MU* itu sendiri.

Berikut rubrik yang ada di *Tabloid Media Umat*. 1) Salam redaksi & Media Pembaca. Pada salam redaksi ini pihak redaksi memberitahukan tentang isu yang diangkat pada edisi ini, berisi ucapan terima kasih kepada pihak yang berkontribusi terhadap tabloid media umat, misalkan dengan melakukan acara bedah tabloid. Pada media pembaca berisi masukan, pertanyaan dari pembaca; 2) Editorial. Pada edisi ini diisi oleh artikel Farid Wadjudi. Editorial ini mirip dengan tajuk

rencana pada koran, yang menunjukkan sikap atau pandangan dari sebuah media; 4) Media Utama. Rubrik ini berisi pembahasan yang ditonjolkan dibahas oleh Tabloid Media Umat. Pada edisi ini yang dibahas adalah mengenai pemilihan umum 2014. 5) Rubrik wawancara. 6) Rubrik Aspirasi; 7) Rubrik telaah wahyu; 9) Rubrik Media Nasional; 10) Rubrik Liputas Khusus; 11) Potret. Ini berisi foto-foto kegiatan yang dilakukan oleh HTI. Ada 9 (sembilan) foto pada halaman ini yaitu Kegiatan yang ditampilkan dalam edisi ini adalah kegiatan Halaqoh Islam & Peradaban yang dilakukan oleh Dewan pengurus Daerah (DPD) Sulawesi Barat yang temanya adalah "*Potensi Caleg Gila*". Ada juga foto kegiatan Halaqoh yang dilakukan oleh HTI cabang Purwasuka (Purwakarta, Subang, dan Karawang) dengan tema Bahaya Liberalisasi Jaminan Sosial. Ada juga foto berisi kegiatan halaqoh DPD 1 Jawa Tengah tentang tentang Jaminan Kesehatan, Tidak Seindah Janjimu. Kegiatan lain yang disampaikan dalam bentuk foto adalah kegiatan halaqoh intelektual di Surabaya, Halaqoh Islam di Bandung, Halaqoh di Riau, Halaqoh di Nusa Tenggara Barat, serta foto kegiatan kunjungan ke pondok modern Gontor; 12) Rubrik Cermin. Ini diisi oleh artikel tentang kebijakan Abdul Malik Marwan; 13) Rubrik Mercusuar; 14) Rubrik Sosok 15) Rubrik Anjangsana; 16) Rubrik Muslimah; 17) Rubrik Konsultasi "*Ustadz Menjawab*"; 18) Rubrik opini; 19) Rubrik Mancanegara; 20) Rubrik Hikmah; 21) Rubrik Iqro. Dan rubrik fokus sebagai rubrik khusus untuk tema yang diangkat.

Artikel yang dimuat pada *Tabloid MU* edisi 125 ini adalah "*Minus Visi ideologis, Minus Harapan*"; "*Yahudi Kristen Jegal Regaknya Khilafah*"; "*Kafir Tahu Khilafah Akan Tegak*"; "*Seribu Langkah Membendung Khilafah*"; "*Siap Hadapi Tantangan!*"; "*Bila raksasa Itu Bangkit*"; "*Khilafah janji Allah : Pasti!*"; "*Mereka Salah Paham*"; "*Wawancara Dengan Saleem Achia (Aktivis HT Inggris)*"; "*Rapatkan Barisan, Songsong Khilafah*" (Wawancara Dengan Ketua Laznah Tsaqofiyah DPP HTI); "*Kebodohan Para Penyembah Selain Allah SWT*"; "*Kaitkan Pemilu Dengan Teroris, BNPT Ingin Tetap Eksis?*"; "*Soal Gunung Ceremai, Negara Khianatai Rakyat*"; "*Kronologi Penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi Gunung Ceremai*"; "*Saatnya memperjuangkan Khilafah*" (Liputan Khusus Dauroh Akbar HTI); "*Sikap Kritis Bikin Eksis; Awas Uang palsu Saat Pemilu*"; "*Mengharap pada Pemilu; Parisipasi Dalam Pemilihan Legislatif, Bolehkan?*"; "*Peran Partai Politik dalam negara Khilafah*"; "*Kebijakan Arabisasi Abdul Malik Bin Marwan*"; "*Nabi Ibrahim dan Keturunannya Melaksanakan Khitan*"; "*Teknologi Tepat Guna Zaman Khilafah*"; "*Mengambil Jalan Perjuangan*"; "*Dari Sebuah Pengajian Jadi Pesantren*"; "*Khilafah Jalan Terang Membangun Peradaban*"; "*Merindukan Generasi Aisyah; Waspada! Penculikan Anak*"; "*Kiat Jadikan Massa Sebagai Pemilih Loyal*"; "*Ada Apa Dengan Jokowi*"; "*Mesir, Militer Vinius Mati 526 Anggota Ikhwan*"; "*Inggris Berencana Adopis Hukum Syari'ah*"; "*Hati-Hati Menebar Janji*". Dari semua 33 artikel di atas yang berkaitan dengan politik secara langsung adalah artikel berjudul "*Minus Visi ideologis, Minus Harapan*", "*Yahudi Kristen Jegal Regaknya Khilafah*", "*Kafir Tahu Khilafah Akan Tegak*", "*Seribu Langkah Membendung Khilafah*", "*Siap Hadapi Tantangan*", "*Mengharap pada Pemilu*", "*Parisipasi Dalam Pemilihan Legislatif, Bolehkah?*", "*Peran Partai Politik dalam negara Khilafah*". Berikut tampilan dalam bentuk tabel.

Pada kajian ini, penulis akan fokus pada isu sentral yang diangkat oleh *Tabloid MU* yang dimuat pada Rubrik Editorial yaitu "*Minus Visi ideologis, Minus Harapan*". Berita semacam tajuk rencana dengan dalam media massa. Berita yang menjadi berita utama akan dijadikan data pendukung dalam melakukan analisis. Berita yang dimaksud adalah : "*Yahudi Kristen Jegal Regaknya Khilafah*"; "*Kafir Tahu Khilafah Akan Tegak*"; "*Seribu Langkah Membendung Khilafah*"; "*Siap Hadapi Tantangan* "; "*Mengharap pada Pemilu*"; "*Parisipasi Dalam Pemilihan Legislatif, Bolehkah?*". Berikut deskripsi wacana editorial yaitu "*Minus Visi ideologis, Minus Harapan*".

Rubrik editorial ini menggambarkan sikap *Tabloid MU* terhadap proses pemilihan umum legislatif 9 April 2014. Artikel berjudul "*Minus Visi Ideologis, Minus Harapan*" menunjukkan keprihatinan terhadap partai politik peserta pemilihan umum 2014 yang dinilainya tidak memiliki pandangan, visi ideologis. Semua partai terjebak dalam pragmatisme untuk tujuan kemenangan. Seruan-seruan kampanye politik dinilai tidak berbobot. Persoalan bangsa yang multidimensional disebabkan karena adopsi teknologi sehingga pilar demokrasi menjadi rusak. Adopsi ideologi kapitalisme ini yang menimbulkan problem sistematik yang multidimensional hampir semua aspek bernegara bermasalah. Mulai dari politik, ekonomi, sosial ataupun budaya. Korupsi juga mengurita.

Pelaku dalam tiga pilar demokrasi (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) juga terlibat dalam korupsi yang sistemik. DPR bahkan berulang kali mendapat gelar lembaga terkorup. Ketua MK malah terjerat hukum. Yang dibutuhkan Indonesia bukanlah sekadar munculnya orang-orang hebat (yang juga begitu sulit ditemukan). Namun Indonesia membutuhkan perubahan yang mendasar (*asasiyah*), menyeluruh (*inqilabiyah*), Perubahan sistemik yang dimulai dari ideologi berikut hukum-hukum yang dibangun atas dasar ideologi itu.

Selama Indonesia masih mengadopsi ideologi kapitalisme -apapun bungkusnya- persoalan Indonesia tidak akan pernah selesai. Partai-partai yang berasaskan Islam juga minus ideologi Islam. Hampir tidak ada yang dengan tegas menyatakan ingin menegakkan syariah Islam secara menyeluruh di bawah naungan khilafah Islam. Padahal perubahan yang ideologis, menyeluruh, dan sistemik hanya bisa diwujudkan dengan tegaknya khilafah Islam yang berasaskan ideologi Islam. Khilafah Islam inilah sebagai institusi politik yang akan menerapkan seluruh syariah Islam secara totalitas. Dengan menegakkan khilafah-lah carut marut persoalan Indonesia akan selesai. Partai Islam harus menyerukan syariah Islam merupakan perintah Allah SWT dalam QS Ali Imran: 104. Kelompok atau partai politik Islam ini wajib menyerukan *al khair*, memerintahkan yang *ma'ruf* dan mencegah kemungkaran.

Dasar penjelasan pada artikel ini dengan mengutip tafsir *Imam at Thabari* dalam tafsirnya "*Jami'ul bayan fi ta'wil Qur'an*" yang menjelaskan pengertian bahwa pengertian *yad'una ila al khair* adalah: *yad'una ila al Islam wa syarai'ih* allati syara'a Allahu li 'ibadihi (menyerukan ke jalan Islam dan syariah-Nya yang disyariatkan Allah SWT kepada hamba-Nya). Kalaupun ada yang menyerukan syariah Islam, namun tidak secara totalitas. Masih berharap syariat Islam diterapkan dalam sistem demokrasi dalam negara sekuler. Sesuatu yang mustahil. Negara sekuler seperti ini tidak akan mungkin menoleransi penerapan syariah Islam secara kaffah apalagi kalau dilandasi kepada kedaulatan di tangan hukum syara'.

Artikel ini mempromosikan khilafah islamiyah. Menurutnya, untuk menegakkan khilafah, sebagaimana yang dicontohkan dalam perjuangan Rasulullah SAW, harus membangun kesadaran umat dan dukungan dari pihak yang memiliki kekuatan (*ahlul quwwah*). Kesadaran umat akan kewajiban khilafah, penerapan syariah Islam yang dibangun atas dasar akidah Islam, akan menggerakkan umat untuk berjuang dan siap berkorban menuntut tegaknya khilafah. Kesadaran ini bukan dibangun atas dasar bujukan kesenangan, rayuan harta, atau hiburan, namun atas dasar akidah Islam. Akidah Islam inilah dasar ideologi yang kuat, sehingga siapapun yang mengembannya akan berjuang sungguh-sungguh, siap menghadapi tantangan, bahkan harus mati sekalipun.

Peralihan kekuasaan (*istilamul hukmi*) secara *syar'i* terwujud dengan dukungan dari *ahlul quwwah* seperti pemimpin kabilah di masa Rasulullah SAW atau militer atau kelompok-kelompok strategis lainnya dalam kondisi sekarang Dukungan dari *ahlul quwwah* ini diperoleh lewat dakwah Islam kepada mereka. Sehingga dukungan ini didasarkan pada keimanan bukan pada pragmatisme atau kecintaan kepada kekuasaan. Umat yang sadar dan *ahlul quwwah* yang mendukung, merupakan orang-orang yang berhasil menghilangkan salah satu kesulitan yang dihadapi dalam dakwah, yaitu sulitnya mengorbankan kehidupan dunia-harta, perdagangan, dan sejenisnya-di jalan Islam dan dakwah. Seperti yang ditulis Syeikh Taqiyuddin an Nabhani dalam kitab *At Takattul al Hizby*, mereka ini adalah orang yang beriman yang sadar ketika diingatkan bahwa Allah SWT telah membeli jiwa dan harta mereka dengan surga.

2. Analisis Teks Editorial "*Minus Visi Ideologis, Minus Harapan*"

Jika artikel di atas dianalisis dengan menggunakan elemen wacana analisis teks yang diperkenalkan oleh Teun Van Dijk, maka dapat diperoleh temuan sebagai berikut dari unsur atau elemen wacana Topi. Topik atau gagasan dominan dari artikel di atas adalah wacana tentang "*perosoalan bangsa memerlukan perubahan mendasar dari sistem sekuler ke sistem islam*". Topik di atas didukung oleh subtopik-subtopik yang mengatakan bahwa (1) persoalan bangsa karena disebabkan sistem sekuler; (2) sistem demokrasi bukan jalan perubahan menuju perbaikan; (3) perubahan hanya dilakukan dengan syariah islam yang dilaksanakan melalui khilafah.

Jika dilihat dari unsur atau elemen skema, yang berkaitan dengan bagaimana si penulis menuturkan gagasannya, penulis mengawali dengan judul artikel yang tendensius, yaitu "*Minus Visi Ideologis, Minus Harapan*". Objek sasaran yang disematkan minus visi ideologi dan minus

harapan adalah kondisi dalam konteks demokrasi. Alur bercerita (*story*) artikel ini diawali identifikasi masalah-sampai solusi. Menurut artikel ini problem utama ini adalah sistem sekulerisme yang kapitalistik. Masalah ini merembet ke persoalan politik yaitu : 1) Partai politik termasuk partai islam yang bersifat pragmatis (kemenangan pemilu); 2) . Lembaga negara yang korup. Di paragraf-paragraf (*conclusion*) akhir diusulkan agar menerapkan syariah secara sempurna melalui khilafah Islam, bukan dengan demokrasi. di paragraf penutup dijelaskan bahwa ini adalah perintah Allah yang perlu disadari oleh umat Islam dan perlu diperjuangkan.

Awal paragraf artikel ini yang merupakan elemen latar, diawali dengan pernyataan bahwa partai politik tidak berkualitas, tanpa visi ideologis. Partai politik hanya melakukan usaha pemenangan dalam pemilihan umum. Lembaga negara hasil pemilu korup. Latar ini memberikan makna semantik yang merujuk pada satu titik bahwa pemilihan umum itu tidak berguna, tidak menghasilkan perubahan mendasar.

Dilihat dari elemen detail. Penulis memberikan informasi detail terhadap informasi yang terkait dengan dampak negatif dari sistem demokrasi di Indonesia. di arikel yang sama, penulis memberikan informasi detail mengenai landasan teologis atau dalil yang memerintahkan umat Islam untuk memeperjuangkan syariat islam. Dampak negatif demokrasi yang diditilkan adalah sebagai berikut : 1) Seruan kampanye jarang yang berbobot; 2) Partai tidak menyampaikan visi ideologis tentang Indonesia; 3) Parpol hanyak umbar slogan kosong; tidak bermakna dan tanpa maksud yang jelas; 4) Hampir semua partai terjebak pragmatisme politik; 5) Ideologi kapitalisme menimbulkan problem sistematik multidimensional; 6) Pelaku dalam tiga pilar demokrasi (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) terlibat korupsi.

Informasi tentang pentingnya syariat dalam khilafah juga diditilkan. Dikatakan bahwa *Pertama* menjalankan syariah adalah kewajiban Allah SWT dalam QS Ali Imran: 104. *Kedua* menegakkan khilafah memerlukan kesadaran umat. *Ketiga* penerapan syariah Islam yang dibangun atas dasar akidah Islam. *Keempat*, akidah Islam adalah dasar ideologi yang kuat. *Kelima*, peralihan kekuasaan (istilamul hukmi) memerlukan dukungan *ahlul quwwah*.

Artikel tersebut bila dianalisis dari sudut maksud (yang berkaitan dengan cara penulis menyampaikan gagasannya apakah secara lugas/eksplisit atau kah tidak) dapat dikatakan bahwa penulis dalam artikel ini menyampaikan secara eksplisit mengenai keburukan-keburukan produk demokrasi seperti partai yang tidak berkualitas, lembaga negara yang korup, dan sebagainya. Artikel juga eksplisit menyampaikan argumen yang berbasis agama (dalil) yang menekankan keniscayaan menjalankan syariat Islam melalui khilafah. Jadi, informasi yang merugikan pihak lain diungkapkan secara lugas.begitu juga informasi yang menguntungkan wacana penulis diungkapkan secara lugas pula.

Dari sisi hubungan antarklausa, antarkalimat, dan antarpagraf atau koherensi, dari hasil analisis ditemukan bahwa penulis menggunakan kata sambung atau konjungsi yang itu memiliki muatan ideologi mendukung wacana penulis menolak demokrasi dan mendukung penerapan syariat islam melalui khilafah Islamiyyah. Berikut hasil temuannya. *Pertama*, Penggunaan kata “*Kalaupun*” - pada kalimat “*kalaupun ada (: Visi parpol) hanya berupa slogan-slogan kosong yang tidak bermakna dan tanpa maksud yang jelas*”. Kata *kalaupun* di atas adalah Konjungsi subordinatif antar klausa, ini menunjukkan bahwa parpol yang memiliki visi sangat jarang, sulit ditemukan.

Kedua, kata “*Padahal*” pada kalimat “*padahal visi ideologis ini sangat penting*” menunjukkan bahwa sesuatu yang penting saja diabaikan oleh partai politik. Logika terbaliknya adalah jika yang sesuatu yang penting diabaikan apalagi persoalan yang lainnya. Secara bahasa kata *padahal* tergolong konjungsi koordinatif. *Ketiga*, kata “*karena*” pada kata “*Karena persoalan bangsa ini justru ada pada ideologinya, yaitu kapitalisme-sekuler*”, menunjukkan bahwa persoalan bangsa erat kaitannya dengan ideologi negara. Penggunaan kata “*karena*” yang merupakan konjungsi subordinatif kausalitas menunjukkan ideologi sekuler adalah penyebabnya. *Keempat*, penggunaan kata “*namun*” yang merupakan konjungsi antar kalimat pada kalimat “*Kita tegaskan yang dibutuhkan Indonesia bukanlah sekedar munculnya orang-orang hebat (yang juga begitu sulit ditemukan). Namun Indonesia membutuhkan perubahan yang mendasar (asasiyah), menyeluruh (inqilabiyah), Perubahan sistemik yang dimulai dari ideologi berikut hukum-hukum yang dibangun atas dasar ideologi itu*” menunjukkan hubungan pertentangan. Makna di sini dapat

ditarik bahwa demokrasi memberikan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh Indonesia, yaitu munculnya orang hebat. Tapi perubahan sistemik dan mendasar.

Kelima, kata “Selama” pada kalimat “*selama Indonesia masih mengadopsi ideologi kapitalisme -apapun bungkusnya- persoalan Indonesia tidak akan pernah selesai*” (paragraf 3) menunjukkan pola hubungan syarat-yang distaratkan. Artinya di sini bahwa persoalan Indonesia akan tetap ada dan akan terus ada. Syarat untuk keluar dari persoalan bangsa Indonesia ini adalah tidak menggunakan sistem kapitalisme. *Keenam*, kata “kalaupun” pada kalimat “*Kalaupun ada yang menyerukan syariah Islam, namun tidak secara totalitas*” menunjukkan bahwa partai politik Islam yang ada jarang bahkan tidak ada yang menyerukan syariat Islam.

Bila dianalisis dari elemen koherensi kondisional, artikel ini menggunakan kata hubung “yang” dalam beberapa kalimat untuk menunjukkan bahwa wacana yang penolakn demokrasi itu wajar beralasan, *reasonable*, dan menegakkan khilafah sangat beralasan. Berikut deskripsi kalimat yang dimaksud. Kalimat “*Bisa disebut, hampir semua partai terjebak pada pragmatisme politik, yang penting menang, bagaimana pun caranya.* (paragraf 1). Kata “yang” bisa dihilangkan sehingga kalimat tersebut menjadi “*Bisa disebut, hampir semua partai terjebak pada pragmatisme politik*”. Kalimat “*Adopsi ideologi kapitalisme ini yang menimbulkan problem sistematis yang multidimensional hampir semua aspek bernegara bermasalah* (pg 2)”. Kalimat ini juga bisa disederhanakan menjadi “*Adopsi ideologi kapitalisme ini yang menimbulkan problem sistematis*”. Kalimat, “*Padahal perubahan yang ideologis, menyeluruh, dan sistemik hanya bisa diwujudkan dengan tegaknya khilafah Islam yang berasaskan ideologi Islam*” ini dapat disederhanakan menjadi “*Padahal perubahan bisa diwujudkan dengan tegaknya khilafah Islam*”. Kalimat, “*Khilafah Islam inilah sebagai institusi politik yang akan menerapkan seluruh syariah Islam secara totalitas*”, dapat disederhanakan menjadi “*Khilafah Islam inilah sebagai institusi politik*”.

Penggunaan anak kalimat untuk memberikan informasi tambahan terkait dengan kontrol wacana. Informasi yang didukung akan diperjelas, dipertegas sehingga akan memberikan dampak kognitif bagi pembaca. Begitu juga sebaliknya, informasi yang tidak mendukung kontrol wacana yang diinginkan oleh penulis akan diabaikan. Dalam menulis artikel ini, penulis juga melakukan koherensi pembeda, yaitu membandingkan peralihan kekuasaan agar seperti yang terjadi di zaman Rasulullah. Hal ini nampak dari paragraf berikut ini : “*Peralihan kekuasaan (istilamul hukmi) secara syar'i terwujud dengan dukungan dari ahlul quwwah seperti pemimpin kabilah di masa Rasulullah SAW atau militer atau kelompok-kelompok strategis lainnya dalam kondisi sekarang*”. Jadi, di sini ada strategi untuk meneladani rosulullah dalam aspek politik.

Dari bentuk kalimatnya (kalimat aktif, pasif, atau nominalisasi), pelaku yang berada pada sistem demokrasi ditampilkan buruk, karena sebagai pelaku yang menciptakan kondisi yang buruk. Wacana ditampilkan dalam bentuk kalimat aktif yang menurut logika bahas berarti ia adalah pelakunya. Berikut kalimat yang dimaksud 1) Adopsi ideologi kapitalisme ini yang *menimbulkan* problem sistematis. Jadi, pada kalimat ini penulis berpandangan bahwa kapitalisme penyebab problem bangsa yang sistemik. 2). Pelaku dalam tiga pilar demokrasi (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) juga terlibat dalam korupsi. Di sini nampaknya, penulis ingin menunjukkan bahwa sistem demokrasi itu rapus, banyak jebakan yang menjerat seseorang untuk terjatuh dalam praktik korup. 3). DPR bahkan berulang kali *mendapat* gelar lembaga terkorup. Kalimat ini mendukung bahwa demokrasi itu rawan dengan praktik korup.

Penulis dari sisi penggunaan kata ganti berusaha ingin membangun persepsi bersama dengan pembaca, atau membangun aliensi dan dukungan dari pembaca. Penggunaan kata “kita” dalam artikel tersebut menunjukkan keinginan penulis untuk membangun hubungan imajiner dengan pembaca. Kata “kita” yang digunakan untuk mengekspresikan gagasan penulis, menunjukkan bahwa si penulis mempersuasi pembaca untuk sependirian dengan penulis artikel pada *Tabloid MU* ini. Kalimat yang digunakan penulis dengan memakai kata “kita” sebagai berikut : 1) “Jarang sekali **kita** mendengar partai menyampaikan visi ideologis mereka tentang Indonesia ke depan”; 2). “**Kita** tegaskan yang dibutuhkan Indonesia bukanlah sekadar munculnya orang-orang hebat”; 3). “Dua hal yang harus **kita** bangun yakni kesadaran umat dan dukungan dari pihak yang memiliki kekuatan (*ahlul quwwah*)”.

Terakhir, dari sisi metafora, penulis artikel *Tabloid MU* mengatakan kepada mereka yang percaya demokrasi dengan kata “*Penjaga-penjaga sekulerisme*”, lembaga DPR yang sering ada kasus korupsi diistilahkan dengan “*gelar terkorup*”; Korupsi di Indonesia dimetaforakan dengan

kata “*menggurita*”. Efek dari penggunaan kata ini adalah menyiratkan kondisi korupsi yang bahaya, dan dampak ini berhulu dari sistem demokrasi. Berikut tampilan rincian hasil analisis teks sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel 2.
Tabel Analisis berita berjudul “*Minus Visi Ideologis, Minus Harapan*”
dalam edisi 125, 4-17 Jumadil Akhir 1435H atau 4-17 April 2014

No	Struktur Wacana	Hal Yang diamanati	Elemen Wacana	Temuan (<i>Findings</i>)
1	2	3	4	5
1	Struktur Makro	Tematik	Topik	Topik: “ <i>perosoalan bangsa memerlukan perubahan mendasar dari sistem sekuler ke sistem islam</i> ”. Subtopik :1) persoalan bangsa karena sistem sekuler; 2) demokrasi bukan jalan perubahan menuju perbaikan; 3) perubahan hanya dilakukan dengan syariah/khilafah.
2	Suprastuktur	Skematik	Skema	Judul berita : <i>Minus Visi Ideologis, Minus Harapan</i> . Objek sasaran yang disematkan minus visi ideologi dan minus harapan adalah kondisi dalam konteks demokrasi. Alur bercerita (<i>story</i>) artikel ini diawali identifikasi masalah-sampai solusi. Problem utama ini adalah sistem sekulerisme yang kapitalistik. Masalah ini merembet ke persoalan politik yaitu : 1) Partai politik termasuk partai islam yang bersifat pragmatis (kemenangan pemilu); 2) . Lembaga negara yang korup. Di paragraf-paragraf akhir diusulkan agar menerapkan syariah secara sempurna melalui khilafah Islam, bukan dengan demokrasi. Di paragraf penutup dijelaskan bahwa ini adalah perintah Allah yang perlu disadari oleh umat Islam dan perlu diperjuangkan.
3	Struktur Mikro	Semantik	1) Latar	Awal paragraf artikel ini diawali dengan pernyataan bahwa partai politik tidak berkualitas, tanpa visi ideologis. Partai politik hanya melakukan usaha pemenangan dalam pemilihan umum. Lembaga negara hasil pemilu korup. → latar ini memberikan makna semantik yang merujuk pada satu titik bahwa pemilihan umum itu tidak berguna, tidak menghasilkan perubahan mendasar.
4	Struktur Mikro	Semantik	2) Detil	Dampak negatif demokrasi didetilkan : 1) Seruan kampanye jarang yang berbobot. 2) Partai tidak menyampaikan visi ideologis tentang Indonesia; 3) Parpol banyak umbar slogan kosong, tidak bermakna, dan tanpa maksud yang jelas; 4) Hampir semua partai terjebak pragmatisme politik; 5) Ideologi kapitalisme menimbulkan problem sistematik multidimensional; 6) Pelaku dalam tiga pilar demokrasi terlibat korupsi. Informasi tentang pentingnya didetilkan : 1) menjalankan syariah adalah kewajiban Allah SWT; 2) menegakkan khilafah memerlukan kesadaran umat; 3) Penerapan syariah Islam yang dibangun atas dasar akidah Islam; 4) Akidah Islam adalah dasar ideologi yang kuat; 5) Peralihan kekuasaan (<i>istilamul hukmi</i>) memerlukan dukungan <i>ahlul quwwah</i> .

1	2	3	4	5
5	Struktur Mikro	Semantik	3) Maksud	Eksplisit menyampaikan keburukan-keburukan produk demokrasi seperti partai yang tidak berkualitas, lembaga negara yang korup, dan sebagainya (lihat di elemen detil). Artikel juga eksplisit menyampaikan argumen yang berbasis agama (dalil) yang menekankan keniscayaan menjalankan syariat Islam melalui khilafah.
6	Struktur Mikro	Semantik	4) Koherensi	1) Penggunaan kata “ <i>Kalaupun</i> ” - pada kalimat “ <i>kalaupun ada (: Visi parpol) hanya berupa slogan-slogan kosong yang tidak bermakna dan tanpa maksud yang jelas</i> ”. 2) Kata “ <i>Padahal</i> ” pada kalimat “ <i>padahal visi ideologis ini sangat penting</i> ” menunjukkan bahwa sesuatu yang penting saja diabaikan oleh partai politik. Logika terbaliknya adalah jika yang sesuatu yang penting diabaikan apalagi persoalan yang lainnya. Secara bahasa kata <i>padahal</i> tergolong konjungsi koordinatif. 3) Kata “ <i>karena</i> ” pada kata “ <i>Karena persoalan bangsa ini justru ada pada ideologinya, yaitu kapitalisme-sekuler</i> ”, menunjukkan bahwa persoalan bangsa erat kaitannya dengan ideologi negara. Penggunaan kata “ <i>karena</i> ” yang merupakan konjungsi subordinatif kausalitas menunjukkan ideologi sekuler adalah penyebabnya. 4) Penggunaan kata “ <i>namun</i> ” yang merupakan konjungsi antar kalimat pada kalimat “ <i>Kita tegaskan yang dibutuhkan Indonesia bukanlah sekadar munculnya orang-orang hebat (yang juga begitu sulit ditemukan). Namun Indonesia membutuhkan perubahan yang mendasar (asasiyah), menyeluruh (inqilabiyah), Perubahan sistemik yang dimulai dari ideologi berikut hukum-hukum yang dibangun atas dasar ideologi itu</i> ” menunjukkan hubungan pertentangan. Makna di sini dapat ditarik bahwa demokrasi memberikan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh Indonesia, yaitu munculnya orang hebat. Tapi perubahan sistemik dan mendasar. 5) Kata “ <i>Selama</i> ” pada kalimat “ <i>selama Indonesia masih mengadopsi ideologi kapitalisme -apapun bungkusnya- persoalan Indonesia tidak akan pernah selesai</i> ” (paragraf 3). menunjukkan pola hubungan syarat-yang distaratkan. Artinya di sini bahwa persoalan Indonesia akan tetap ada dan akan terus ada. Syarat untuk keluar dari persoalan bangsa Indonesia ini adalah tidak menggunakan sistem kapitalisme. 6). Kata “ <i>kalaupun</i> ” pada kalimat “ <i>Kalaupun ada yang menyerukan syariah Islam, namun tidak secara totalitas</i> ” menunjukkan bahwa partai politik Islam yang ada jarang bahkan tidak ada yang menyerukan syariat Islam.

1	2	3	4	5
7	Struktur Mikro	Semantik	5) Koherensi kondisional	<p>Artikel ini menggunakan kata hubung “yang” dalam beberapa kalimat untuk menunjukkan bahwa wacana yang penolakan demokrasi itu wajar beralasan, <i>reasonable</i>. Dan menegakkan khilafah sangat beralasan. Berikut kalimat yang dimaksud :</p> <p>1) “<i>Bisa disebut, hampir semua partai terjebak pada pragmatisme politik, yang penting menang, bagaimana pun caranya.</i> (p. 1). Kata “yang” bisa dihilangkan sehingga kalimat tersebut menjadi <i>Bisa disebut, hampir semua partai terjebak pada pragmatisme politik</i>”.</p> <p>2) “<i>Adopsi ideologi kapitalisme ini yang menimbulkan problem sistemik yang multidimensional hampir semua aspek bernegara bermasalah</i> (p.2)”. Kalimat ini juga bisa disederhanakan menjadi “<i>Adopsi ideologi kapitalisme ini yang menimbulkan problem sistemik</i>”.</p> <p>3) Kalimat “<i>Padahal perubahan yang ideologis, menyeluruh, dan sistemik hanya bisa diwujudkan dengan tegaknya khilafah Islam yang berasaskan ideologi Islam</i>” ini dapat disederhanakan menjadi “<i>Padahal perubahan bisa diwujudkan dengan tegaknya khilafah Islam</i>”.</p> <p>Kalimat “<i>Khilafah Islam inilah sebagai institusi politik yang akan menerapkan seluruh syariah Islam secara totalitas</i>”, dapat disederhanakan menjadi “<i>Khilafah Islam inilah sebagai institusi politik</i>”.</p>
8	Struktur Mikro	Semantik	6) Koherensi pembeda	<p>Di sini ada perbandingan antara peralihan kekuasaan dengan <i>ahlu quwwah</i> zaman dulu Rosulullah SAW) dengan sekarang ini. Berikut kalimatnya : “<i>Peralihan kekuasaan (istilamul hukmi) secara syar'i terwujud dengan dukungan dari ahlu quwwah seperti pemimpin kabilah di masa Rasulullah SAW atau militer atau kelompok-kelompok strategis lainnya dalam kondisi sekarang</i>”. Jadi, di sini ada strategi untuk meneladani rosulullah dalam aspek politik.</p>
9	Struktur Mikro	Semantik	7) Peningkaran	----
10	Struktur Mikro	Sintaksis	1) Bentuk kalimat	<p>Pelaku yang berada pada sistem demokrasi ditampilkan buruk, karena sebagai pelaku dari keburukan. Wacana ditampilkan dalam bentuk kalimat aktif yang menurut logika bahas berarti ia adalah pelakunya. Berikut kalimat yang dimaksud : 1) Adopsi ideologi kapitalisme ini yang <u>menimbulkan</u> problem sistemik. 2) Pelaku dalam tiga pilar demokrasi (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) juga terlibat dalam korupsi’ 3) DPR bahkan berulang kali <u>mendapat</u> gelar lembaga terkorup.</p>

1	2	3	4	5
11	Struktur Mikro	Sintaksis	2) Kata ganti	Kata “kita” digunakan untuk mengekspresikan gagasannya. Penggunaan kata ini menunjukkan bahwa si penulis mengimajinasikan, atau berusaha membangun alienasi dengan pembaca untuk sendirian dengan penulis artikel pada Tabloid Media Umat ini. berikut kalimat yang menggunakan kata “kita” : 1) Kita pada kalimat Jarang sekali kita mendengar partai menyampaikan visi ideologis mereka tentang Indonesia ke depan; 2) Kita tegaskan yang dibutuhkan Indonesia bukanlah sekadar munculnya orang-orang hebat; 3) dua hal yang harus kita bangun yakni kesadaran umat dan dukungan dari pihak yang memiliki kekuatan (<i>ahlul quwwah</i>) Partai politi yang ikut pemilu diistilahkan dengan kata “bertarung”, semua partai terjebak pragmatisme politik,
12		Stilistik	1) Leksikon	
13			2) Praanggapan	---
14	Struktur Mikro	Retorika	1) Grafis	Pada bagian ini elemen grafis yang ditonjolkan adalah gambar partai politik yang menjadi kontestan pemilu. Nampaknya, Tabloid Media Umat dalam editor ini tidak memaksimalkan wacana melalui elemen grafis.
15	Struktur Mikro	Retorika	1) Metafora	Mereka yang percaya demokrasi diistilahkan dengan kata “ <i>penjaga-penjaga sekulerisme</i> ”, lembaga DPR yang sering ada kasus korupsi diistilahkan dengan “ <i>gelar terkorup</i> ”; Korupsi di Indonesia dimetaforakan dengan kata “ <i>menggurita</i> ”. Efek dari penggunaan kata ini adalah menyiratkan kondisi korupsi yang bahaya.

Sumber: Hasil Penelitian

3. Diskusi

Sikap editor *Tabloid MU* yang ditulis oleh Farid Wajdi menolak sistem demokrasi. Sikapnya ini disebarluaskan melalui media-media Islam seperti Arrahmah.com, farid1924.wordpress.com, soundcloud.com, khilafah.com, dan situs hti.or.id. Sementara itu, untuk media cetak, pemikirannya dituangkan dalam media-media yang dimiliki oleh HTI seperti buletin *Al-Islam*, *Tabloid MU*, *Majalah Al-Wa'ie*. Untuk menjawab mengapa ia menolak demokrasi, penulis akan melakukan analisis mengapa dia menolak demokrasi baik sebagai individu dan sebagai anggota organisasi HTI. Farid Wajdi menolak demokrasi karena beberapa alasan. *Pertama*, Demokrasi fokus kepada suksesi kepemimpinan. Boleh jadi ada pemerintahan yang telah stabil namun kembali goncang karena menjelang agenda suksesi atau malah semakin memburuk. Jadi standar pergantian kepemimpinan bukanlah dilihat dari aspek kualitas memimpin tapi kepentingan untuk pergiliran kekuasaan.

Kedua, Mekanisme Kontrol. Dengan ada pembagian kekuasaan, maka bisa terjadi tarik menarik kepentingan. Dengan ada partai oposisi membuat negara tidak stabil karena selalu digoncang oleh isu apa saja untuk menaikkan popularitas Partai oposan. *Ketiga*, Lembaga perwakilan (DPR) sering mengeluarkan kebijakan yang tidak populis dan tidak berpihak rakyat banyak. Demokrasi berpihak kepada pemilik modal. Jadi menurut Farid Wajdi demokrasi tak pernah menghasilkan kesejahteraan. Jadi, Farid Wajdi menentang demokrasi karena tak ada yang bisa diharapkan dari demokrasi. Menurutnya, demokrasi hanyalah menciptakan negara korporat.

Ada dua sumber yang mempengaruhi Farid Wajdi sehingga menolak demokrasi. *Pertama*, penolakan demokrasi yang bersumber dari fenomena faktual bahwa demokrasi tak bisa diharapkan. Ini kemudian dikuatkan lagi oleh beberapa pernyataan tokoh yang juga menolak demokrasi. *Kedua*, menolak demokrasi karena faktor ideologi Islam. Inti yang menjadi keyakinan Farid Wajdi adalah

demokrasi itu bukan cara Islam. Oleh karena itu, ia harus ditinggalkan. Sebagai gantinya adalah berjuang untuk menegakan hukum Islam. Farid Wajdi meyakini bahwa hukum Islam (*syariat Islam*) hanya bisa tegak dengan cara mendirikan Negara Islam yang dikenal dengan khilafah islamiyah. Jadi yang melatarbelakangi Farid Wajdi menulis artikel di *Tabloid MU* adalah karena kekecewaan dan motivasi ideologi Islam. kondisi ini tidak bisa lepas dari kondisi atau konteks sosiokultur masyarakat dalam kaitannya dengan demokrasi.

Tabloid MU adalah organisasi media yang mengusung semangat revivalisme atau fundamentalisme (dalam arti yang netral) seperti diuraikan sebelumnya. Menurut M. 'Abid Al-Jâbirî, istilah '*muslim fundamentalis*' awalnya dicetuskan sebagai penanda (*signifier*) bagi gerakan Salafiyyah Jamaluddin Al-Afghânî. Istilah ini, dicetuskan karena bahasa Eropa tak punya istilah padanan yang tepat untuk menterjemahkan istilah Salafiyyah. Hingga Anwar Abdul Malik pun memilih istilah itu sebagai representasi dari istilah Salafiyyah Al-Afghânî, dalam bukunya *Mukhtarât min Al-Adab Al-Arabi Al-Mu'âshir*, dengan tujuan memudahkan pemahaman dunia tentangnya dengan istilah yang sudah cukup akrab, yaitu fundamentalisme. Hassan Hanafi. Professor filsafat Universitas Cairo ini mengatakan bahwa term '*muslim fundamentalis*' adalah istilah untuk menunjuk gerakan kebangkitan Islam. Awalnya populer di kalangan umat kristen yang berusaha kembali ke asas ajaran Kristen yang pertama. *Term* itu kemudian berkembang, lalu disematkan pada setiap aliran yang keras dan rigid dalam menganut dan menjalankan ajaran formal agama, serta ekstrem dan radikal dalam berpikir dan bertindak (Sattar 2013).

Ada beberapa motif gerakan Islam fundamentalis, salah satunya adalah gerakan perlawanan sebagai reaksi terhadap modernitas dan weternalisi atau pembaratan. Di sinilah demokrasi merupakan paket yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat modern. Sosiokultur masyarakat di Indonesia dan organisasi umat Islam dalam kaitannya dengan demokrasi dan produk demokrasi berbeda-beda, ada yang menerima dan ada yang menerima. Begitu juga dengan partisipasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan terhadap proses pemilihan umum sebagai produk demokrasi berbeda-beda. Organisasi umat islam terpecah menjadi dua kubu dalam kaitannya dengan demokrasi. Organisasi islam yang menerima demokrasi adalah Muhammadiyah; Al-Irsyad; Persatuan Islam (Persis); Nahdlatul Ulama; Jamaah Tabligh. Sementara yang menolak adalah Jamaah *Salafy*; Jamaah Anshorut Tauhid; Hizbut Tahrir Indonesia. Kebanyakan organisasi Islam menerima demokrasi. Bipolarisasi sikap organisasi masa Islam terhadap demokrasi menunjukkan adanya problem terkait justifikasi demokrasi itu sendiri.

Bagi masyarakat umum pun, sikap terhadap demokrasi tak seperti yang diharapkan oleh lembaga penegak demokrasi di Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilihan umum, dan pemilihan kepala daerah tak maksimal karena tingginya angka golput (mereka yang tak menggunakan hak suaranya). Menurut Survei Indonesia (LSI), angka golput pada Pemilu 1999 10,21 persen. Pada pileg 2004, angkanya naik menjadi 23,34 persen dan pada pemilu legislatif 2009 naik lagi menjadi 29,01 persen. Dan pemilihan umum 2014 ini juga dibayang-bayangi peningkatan Golput. Fenomena golput disebabkan oleh ketidakpercayaan masyarakat kepada institusi pemilu, bahkan kepada pemerintah.

Wacana delegitimasi sistem demokrasi HTI bila disederhanakan menjadi dua : sistem demokrasi atas pertimbangan politik, dan wacana delegitimasi demokrasi atas argumen syara (hukum Islam). **Pertama.** *Delegitimasi Demokrasi dengan Argumen Politik.* Pemilihan umum adalah produk dari demokrasi, dan memang demokrasi itu sendiri diindikasikan oleh adanya pemilihan umum. Negara-negara di dunia harus patuh pada yang bernama demokrasi ini. Hal ini kemudian menimbulkan reaksi dari muslim dan menawarkan alternatif sistem, yang hulunya pada ajaran Islam. Ketua Lajnah Siyasiyah/politik DPP Hizbut Tahrir Indonesia Yahya Abdurrahman, dalam artikel yang berjudul "*Mengharap Perubahan Dari Pemilu*" pada rubrik fokus *Tabloid MU* menegaskan bahwa Pemilu yang ada bahkan tidak membawa perubahan orang. Sebagian besar akan tetap orang dan muka lama.

Menurutnya pemilu memiliki beberapa fungsi, di, antaranya: sebagai sarana legitimasi politik; sarana sirkulasi kekuasaan; sebagai representasi politik untuk mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan rakyat; sebagai implementasi kedaulatan rakyat; dan untuk sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat. Pemilu hakikatnya merupakan mekanisme rotasi kekuasaan secara damai dan menjadi media untuk memilih para pemimpin politik dan wakil rakyat yang akan menjalankan mandat rakyat. Dari situ, pemilu dilakukan bertujuan mentransformasikan suara (*vote*) ke dalam

keputusan politik (*political decision*). Karena pemilu dalam sistem demokrasi didesain hanya untuk rotasi kekuasaan, yang akan berubah adalah person atau individu penguasa dan wakil rakyat.

Pemilu bukan berarti rakyat bebas memilih orang yang mereka kehendaki. Faktanya, dalam pemilu di mana saja di negara demokrasi, rakyat hanyalah memilih orang-orang yang sudah dipilih dan disodorkan oleh partai. Sementara dari sisi realitas pemilu yang ada, pemilu ini cenderung semakin mahal, baik dari sisi besarnya anggaran dan biaya pemilu yang dikeluarkan oleh pemerintah, maupun dari biaya politik yang dikeluarkan oleh parpol dan politisi. Dari sisi biaya, anggaran pemilu terus naik. Biaya politik yang dikeluarkan oleh politisi dari pemilu ke pemilu makin besar.

Biaya politik tinggi itu meminta kompensasi dan membawa konsekuensi. Kompensasinya, caleg harus mengkompensasi dana yang dia peroleh dari cukong, jika ternyata dana kampanyenya berasal dari cukong. Itu melalui dua cara: pertama, kebijakan yang menguntungkan para kapitalis, seperti pemberian konsesi lahan atau tambang; keringanan pajak, pembebasan bea, pajak dibayari negara. Atau kedua, dengan rekayasa atau pengaturan proyek. Proyek di buat dan dibagi-bagi untuk para cukong itu. Karena pemilu yang ada bahkan tidak membawa perubahan orang, sebagian besar akan tetap orang dan muka lama. Konsekuensinya, corak kebijakan, UU yang dibuat, dan keputusan-keputusan politik dari dewan dan penguasa hasil pemilu nanti akan sama saja. Kalaupun ada perubahan, maka itu hanyalah perubahan minor dan tidak substansial.

Kedua, Delegitimasi Atas Dasar Hukum Syara. Delegitimasi ini dilakukan oleh HTI dengan cara melakukan pengambilan dalil. Menurut HTI, aktivitas seorang Muslim terikat dengan hukum syara'. Tidak ada tindakan seorang Muslim yang bebas aturan. Pemilu anggota legislatif itu berlaku hukum *wakalah* dalam syariah Islam. *Wakalah* hukum asalnya adalah mubah (boleh), hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ra, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Aktivitas dewan legislatif seperti fungsi melantik presiden dan wakil presiden, pengawasan, koreksi dan kontrol terhadap pemerintah berbeda dengan yang dibenarkan oleh Islam. Dalil yang dikutip oleh HTI adalah QS. An-Nisa'n [4]: 65; QS, Al Ahzab [33] : 36; QS At-Tawbah [9]: 31. *Wakalah* hukumnya boleh, selama tujuannya adalah untuk amar makruf dan nahi munkar. Oleh karena itu, pencalonan anggota dewan legislatif dalam rangka melaksanakan amar makruf dan nahi munkar secara syar'i adalah boleh selama memenuhi syarat-syarat *syar'i* nya.

PENUTUP

Bagian ini berisi jawaban pertanyaan penelitian, yaitu tentang Wacana delegitimasi apa yang muncul pada *Tabloid MU* , dan apa alasan melakukan delegitimasi demokrasi melalui medianya (*Tabloid MU*). Terkait dengan tentang wacana delegitimasi, *Tabloid MU* melakukan delegitimasi terhadap partai politik dan delegitimasi terhadap lembaga DPR (legislatif). Ini sesuai dengan momen saat terbitnya tabloid ini yaitu pada momen pemilihan legislatif. Partai politik tak akan menciptakan kemajuan dan menyelesaikan persoalan bangsa. Sebab menurut wacana *Tabloid MU* ini, akarnya terletak pada sistem yang sekuler dan kapitalistik. Problem ini kemudian merembet ke persoalan politik berupa partai politik termasuk partai islam yang pragmatis, lembaga negara yang korup. Pada sektor ekonomi sistem yang sekuler dan kapitalistik tidak akan menciptakan kesejahteraan tapi menguntungkan para kapitalis.

Terkait dengan pertanyaan kedua, mengenai alasan melakukan delegitimasi demokrasi, dapat disimpulkan bahwa delegitimasi demokrasi didasarkan pada dua konteks yang berbeda. *Pertama*, kinerja lembaga politik (partai politik, pemerintah) yang tidak mampu memberikan kemajuan dan kesejahteraan. Sebaliknya, lembaga politik dan penegak hukum yang korup menjadi bukti untuk mendelegitimasi demokrasi karena lembaga tersebut merupakan pilar demokrasi. Demokrasi selalu berpihak kepada pemilik modal, cukong, yang hanya melahirkan para *demagogue*, yaitu pemimpin yang hanya mengejar popularitas, namun tidak memiliki kepemimpinan yang berorientasi pada publik, pemimpin tanpa kepemimpinan.

Kedua, delegitimasi atas dasar teologis, dalil *syar'ie*. *Tabloid MU* , mempersuasi bahwa setiap muslim itu terikat dengan hukum Islam dalam segala aspeknya, termasuk pada aspek politik. Aktivitas, peran dan fungsi lembaga legislatif berupa penetapan hukum (undang-undang), menetapkan presiden adalah aktivitas-aktivitas yang menyalahi hukum islam, dan harus ditinggalkan karenanya. Jadi, *Tabloid MU* mendelegitimasi demokrasi dengan merujuk pada literature Islam (Al-Quran, Al-Hadits).

Daftar Pustaka

- Berger, Peter L., Luckmann, Thomas. (1966). *The Social Construction Of Reality, The Treatise In The Sociology Of Reality*. Garden City, N.Y. : Doubleday.
- Eriyanto. (2009). *Analisis Wacana, Pengantara Analisis Teks Media*. Yogyakarta : LkiS.
- Esposito, John L. (1988). "ISLAM : The Straight Path. 3rd", (terjemahan) Islam Warna Warni, Ragam Ekspresi Menuju "Jalan Lurus" (Al-Shirat Al-Mustaqim). (Arif Maftuhin, Penerjemah). Jakarta : Paramadina.
- Gaffar, Afan. (1996). *Politik Indonesia Menuju Transisi Demokrasi*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Gee, James, Paul. (2005). *An Introduction to Discourse Analysis, Theory and Method* second edition. London & NY: Routledge.
- Huntington, Samuel. (1996). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon & Schuster.
- Littlejohn, Stephen W., Foss, Karen A. (2011). *Theories Of Human Communication, Tenth Edition*. Long Grove, Illinois : Waveland Press Inc.
- Littlejohn, Stephen. (2009). *Theories of Human Communication, Seventh Edition*. Belmont: Wadsworth.
- Lyotard, Jean-François. (1986). *The Postmodern Condition A Report on Knowledge*. Minneapolis : University of Minnesota Press.
- Media Umat, edisi 125, 4-17 Jumadil Akhir 1435 H/4-17 April 2014.
- Sattar, Abdullah. (2013). Fenomena Sosial Fundamentalisme Islam. *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 3, No.1, April 2013
- Schwandt, T. A. (1994). Constructivist, Interpretivist Approaches to Human Inquiry. In *Handbook of Qualitative Research*, Ed. Lincoln, 118-137. California: Sage Publication.
- Sindhunata. (1993). *Dilema Usaha Manusia Rasional: Kritik Masyarakat Modern oleh Max Horkheimer dalam Rangka sekolah Frankfurt*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suseno, Frans Magnis. (1999). *Pemikiran Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia.
- Taher, Tarmizi. (1998). *Radikalisme Agama*. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), IAIN Jakarta.

**STATISTIK HUBUNGAN BIAYA PENGELUARAN PER BULAN
 DENGAN PENGETAHUAN TENTANG JENIS MEDIA**

Biaya Yang Dikeluarkan Per Bulan X Pengetahuan Tentang Ragam Jenis Media	Pearson Chi-Square Test Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Makna Hubungan	
				Signifikan	Tidak Signifikan
"Kaskus"	10.187(a)	5	.070		.070
TokoBagus	2.605(a)	5	.761		.761
"Berniaga"	5.459(a)	5	.362		.362
"Multiply"	14.524(a)	5	.013	013	
"Bhinneka"	15.192(a)	5	010	010	
"Lazada Indonesia"	31.343(a)	5	.000	.000	
"Agoda"	30.749(a)	5	.000	000	
"Tokopedia"	6.767(a)	5	.239		.239
"Facebook"	5.009(a)	5	.415		.415

**STATISTIK HUBUNGAN BIAYA PENGELUARAN PER BULAN
 DENGAN TERPAAN MEDIA**

Biaya Yang Dikeluarkan Per Bulan X Sering tidaknya Menggunakan "Chatting " Melalui	Pearson Chi-Square Test Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
"YM"	8.439(a)	5	134
What's App	10.574(a)	5	.061
BBM	20.464(a)	5	.001
"Line"	12.302(a)	5	.031
"Wechatt"	7.602(a)	5	.180
"Kakao Talk"	10.367(a)	5	.065
Jejaring Sosial FB"	2.891(a)	5	.717
Jejaring Sosial Twitter"	2.556(a)	5	.768
"PATH"	9.513(a)	5	.090
"Google+"	4.473(a)	5	.484
Fix Telephone	7.022(a)	5	219

Sumber : Hasil Penelitian BPPKI Jakarta, "Aktifitas Ekonomi Masyarakat Melalui Internet, Kasus Aktifitas "Online Shopping Sites", Balibang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2014.